

# ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PASURUAN

Achmad Miftahul Khoiri<sup>1</sup>, Ulfa Binada<sup>2</sup>, Bahagia Nastiti<sup>3</sup>

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: ulfabinada@gmail.com

**Abstrak:** Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan yang diakibatkan oleh Covid-19 menuntut strategi efektif dari pemerintah daerah setempat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji apa saja strategi untuk mengentaskan kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan serta bagaimana dampak dari strategi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan strategi program pengentasan kemiskinan melalui koordinasi dengan masing-masing dinas terkait, misalnya program menurunkan beban pengeluaran dan penguatan ekonomi kreatif oleh Dinas Sosial dan Dinas Koperasi yang diidentifikasi menjadi program yang cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa identifikasi kelompok sasaran merupakan komponen prasyarat keberhasilan program pengentasan kemiskinan, serta perlu adanya peran lebih dari *stakeholder* untuk meningkatkan keefektifitasan program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, Program yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan secara optimal dengan diiringi peran *stakeholders* untuk meningkatkan efektivitas program untuk mengentaskan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengentasan Kemiskinan, Covid-19, Kabupaten Pasuruan

**Abstract:** The high poverty rate in Pasuruan Regency caused by Covid-19 has resulted a high demand for an effective strategy from the local government. The purpose of this study is to examine the strategies to alleviate poverty caused by the Covid-19 pandemic in Pasuruan Regency. This research is a descriptive research conducted through a qualitative approach with relevant primary and secondary data sources. The results of the study found that the Pasuruan Regency government tried to improve the welfare of the poor who were affected by the Covid-19 pandemic by preparing a poverty alleviation program strategy in collaboration with the relevant agencies. The program to reduce the burden of spending and strengthen the creative economy by the Social Service and the Office of Cooperatives and MSMEs is the most effective program for the success of poverty alleviation. This study also found that identification of target groups is a prerequisite component for the success of poverty alleviation programs, and the need for more roles from stakeholders to increase the effectiveness of poverty alleviation programs. Thus, the program prepared by the Pasuruan Regency Government needs to be carried out optimally accompanied by the role of stakeholders to increase the effectiveness of the program to alleviate poverty due to the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** Effectiveness, Poverty Alleviation, Covid-19, Pasuruan Regency

## PENDAHULUAN

Fenomena Covid-19 mulai menyita perhatian publik sejak kemunculannya pada awal tahun 2020 dengan pola persebaran yang cukup masif. Menyikapi masalah ini, WHO selaku lembaga kesehatan dunia dengan cepat mengambil langkah untuk menyusun panduan pencegahan dan penanganan Covid-19 agar dapat diterapkan di seluruh negara (WHO, 2021). Menurut data sebaran Covid-19 yang termuat

dalam situs resmi Pemerintah Indonesia, covid19.go.id, jumlah kasus Covid-19 yang tercatat di Indonesia hingga tanggal 8 April 2022 mencapai lebih dari 6 juta kasus. Fenomena ini telah menimbulkan dampak signifikan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi yang merupakan sektor strategis dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat (Junaedi & Salistia, 2020). Dilihat dari kaca mata sektor ekonomi, permasalahan pandemi ini telah

mengakibatkan Indonesia berada dalam kondisi defisit keuangan, utamanya pada tahun 2020-2021 (Ruhana & Ferdiansyah, 2020).

Kondisi defisit perekonomian yang dialami oleh pemerintah di berbagai negara berkembang memicu perhatian lebih pada kondisi kemiskinan masyarakat. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi tersebut sehingga tidak memperparah tingkat kemiskinan masyarakat (Tarigan, *et al.*, 2020). Meskipun demikian, permasalahan Covid-19 yang pelik mengakibatkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut masih belum dapat membendung laju peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan naiknya persentase angka kemiskinan yang semula 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10% pada tahun 2021 (KemenkoPMK, 2021).

Kemiskinan erat kaitannya dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kemiskinan melampaui pemahaman ini, karena merupakan masalah kompleks yang tidak dapat berdiri sendiri. Tingkat kemiskinan suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, untuk mengukur tingkat kemiskinan penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar, yakni kebutuhan non makanan diukur dari sisi pengeluaran. Menurut konsep ini, penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Orang dianggap dibawah garis kemiskinan jika pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan yang menentukan pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Proporsi penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, turun 0,04 poin persentase dari September 2020 dan meningkat 0,36 poin persentase dari Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan penting dan bersifat multidimensi. Terdapat beragam cara pandang dalam menentukan alat ukur kemiskinan sehingga tidak mudah untuk mengukurnya secara tepat dan akurat. Salah satu wilayah yang terkena imbas kenaikan angka kemiskinan akibat Covid-19 adalah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan mencapai 9,26% dan mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Pasuruan, 2021). Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah penduduk yang padat mencapai 1.6 juta dengan penduduk miskin sebanyak

151,430. Naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh pengangguran akibat pandemi, sehingga menjadikan orang miskin rentan lebih miskin. Peningkatan pengangguran serta penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan telah mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Suryahadi et al. 2020).

Menurut data yang disajikan dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja di bidang industri. Sektor tersebut berkontribusi besar menjadi penyedia lapangan usaha bagi penduduk dan telah memajukan tingkat perekonomian dibandingkan pekerjaan lain. Namun demikian, pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak buruk terhadap perekonomian yang telah mengakibatkan masyarakat harus kehilangan pekerjaan dan memicu pada kenaikan angka pengangguran. Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, Terdapat 3,36 juta orang dengan 10,52 % diantaranya penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dengan rincian yang disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Kab. Pasuruan**

No	Kategori	Jumlah
1	Pengangguran karena Covid-19	248.050
2	Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19	88.530
3	Tidak Bekerja karena Covid-19	240.350
4	Penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena Covid-19	2.780.000

Sumber: BPS Kab.Pasuruan (2020)

Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Pasuruan seiring dengan

dampak pandemi Covid-19 yang kemudian memicu pada naiknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai dampak pandemi agar angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menurun, menstabilkan perekonomian di masa pandemi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengentasan kemiskinan di daerah diharapkan mampu membantu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah kemiskinan ekstrim baik di masa ini maupun masa depan.

Permasalahan meningkatnya angka kemiskinan yang dialami Kabupaten Pasuruan dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pada peningkatan angka pengangguran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan yang semakin meningkat namun belum seutuhnya dapat membuahkan hasil yang maksimal. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh melalui program Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan pihak terkait, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas pada program pengentasan kemiskinan.

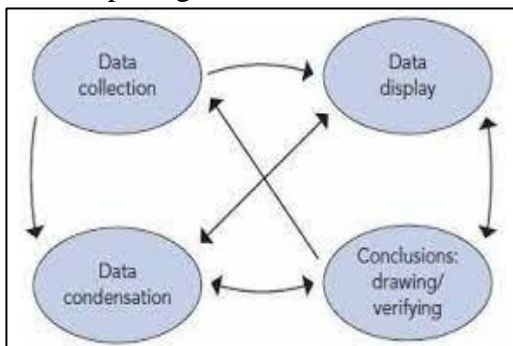
## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mayer dan Greenwood dalam (Silalahi & Ulber, 2012) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa saja strategi dalam pengentasan kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil pertemuan langsung melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2021, sedangkan data sekunder berdasarkan penelusuran pustaka dan data-data lain dari instansi serta lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Namun, dalam menganalisis data perlu adanya interpretasi untuk mencari hasil penelitian dari data yang diperoleh dengan teori yang relevan (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (2007).

Pada analisis model pertama dilakukan proses pengumpulan data/*data collection*, yaitu dilakukan pencatatan hasil FGD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, serta pengumpulan data dari dokumen pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan data-data terkait lainnya yang berfungsi sebagai data pendukung penelitian. Selanjutnya, kondensasi data/*Data Condensation* merupakan proses menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi sebagaimana dapat diamati pada gambar berikut.



**Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif**

Sumber: Miles dan Huberman (2007)

Di sisi lain, menurut Mantja (2007) menambahkan, proses ini berlangsung secara terus menerus sepanjang

penelitian belum berakhir karena data kondensasi merupakan bagian dari analisis dan tidak terpisahkan. Penyajian data/*Data Display* bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi data dengan teori yang digunakan dalam analisis. Proses penarikan kesimpulan/*Conclusion Drawing and Verifying* berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi dari literatur atau teori yang digunakan dan akan menghasilkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian baik yang dilakukan melalui kegiatan wawancara langsung maupun melalui FGD dengan serangkaian stakeholder yang berkecimpung di masing-masing kegiatan berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, maka secara umum dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan cukup responsif dalam merespon perubahan tingkat kemiskinan akibat Covid-19.

Menurut penuturan dari bapak Kokok Adi Prayogo sebagai salah satu narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan menjelaskan, bahwa:

“.....sebenarnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah cukup responsif dalam merespon perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi akibat Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian program-program penguatan ekonomi yang ada di level grassroot atau level bawah. Tujuannya tidak lain adalah menghidupkan unit-unit ekonomi di masyarakat menengah kebawah, sehingga mereka bertahan dari situasi Covid ini...” (Hasil wawancara pada 26 September 2021).

Selain itu, informasi dari beberapa program unik juga diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan koordinasi melalui dinas-dinas terkait yang membidangi masing-masing permasalahan. Berdasarkan penuturan dari bapak Ibnu Wahyudi dari Bappeda Kab. Pasuruan menjelaskan:

*“...Kita memang harus menjadi inisiator yang menggagas program-program baru untuk masyarakat di masa-masa seperti ini... bentuk inisiasi ini penting dalam mewujudkan inovasi publik guna memaksimalkan peran serta pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat... Adapun beberapa program tersebut, misalnya Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat yang dikemas melalui program ‘PODO ROSO’ selain itu ada program Koordinasi Intensif Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan Setiap Hari Kamis yang dikemas dalam program ‘KEMISAN’ dan beberapa program-program lain yang dijalankan oleh masing-masing dinas...”* (Hasil Wawancara pada 27 September 2022)

Berdasarkan uraian dari bapak Ibnu Wahyudi tersebut, informasi lebih

mendalam kemudian diperoleh dari hasil observasi pada dokumen penanggulangan kemiskinan Kab. Pasuruan yang dapat dilihat pada tabel 2.

Meskipun pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kab. Pasuruan sudah tergolong maksimal, tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program program-tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan terhadap sejumlah narasumber, dapat diketahui bahwa beberapa hambatan yang terjadi diantaranya, 1) adanya kesenjangan data (*asymmetric data*) antara DTKS dengan data pemerintah daerah. Kesenjangan ini mengakibatkan perbedaan pemetaan jumlah penduduk miskin dan menyulitkan proses identifikasi penerima bantuan kemiskinan. Selanjutnya, 2) minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hidupnya kegiatan ekonomi di tingkat bawah juga menjadi faktor penghambat dalam memperkuat jaring pengaman perekonomian di tingkat bawah. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah uang beredar di daerah tersebut.

No	Nama Jargon Program	Deskripsi
1	Rumahku Surgaku	Pembangunan Berbasis Keluarga
2	Wak Muqidin	Wayah Kumpul Mbangun TPQ dan Madin (Waktunya berkumpul untuk membangun TPQ dan Madin)
3	Kemisan	Koordinasi Intensif pengentasan kemiskinan yang dilakukan setiap hari kamis
4	Satrya Emas	Pendampingan UMKM dan Stimulus kepada masyarakat untuk berwirausaha
5	Pasuruan Podo Roso	Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat
6	Perwira Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dalam hal ekonomi dengan memberikan kesempatan berusaha agar lebih produktif
7	Agawe	Gerakan pembuatan jamban di setiap rumah
8	Gerakan Yuk Nonggo	Gerakan agar modal masyarakat tidak keluar dari daerah ( <i>Capital Out-flow</i> ) dengan cara ayo tuku nang tonggo/ ayo membeli di tetangga sendiri (yuk nonggo)

**Tabel 2. Uraian tentang Jargon Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan**  
Sumber: dokumen penanggulangan kemiskinan Kab. Pasuruan (2021)

Hal ini diperparah dengan kondisi merupakan daerah dengan jumlah basis Kabupaten Pasuruan yang industri yang cukup tinggi, sehingga

perputaran uang keluar (*Capital Court-low*), nyaris menjadi fenomena tidak terhindarkan. Lalu yang ke-3, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program anjuran pemerintah juga menjadi kendala tersendiri dalam melancarkan implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Stigma bahwa program-program pemerintah daerah hanya diperuntukan oleh beberapa orang tertentu masih menjadi budaya laten di beberapa individu, sehingga partisipasi untuk mengikuti program masih menjadi tantangan bagi pemerintah.

Selanjutnya kesulitan terakhir adalah perihal pemangkasan anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam skema *refocusing* program dan realokasi anggaran. Kendatipun kebijakan *refocusing* program dan realokasi anggaran tersebut dinilai cukup tepat dalam menghadapi masa pandemi, tetapi dampak pemangkasan tersebut seringkali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari terhambatnya program-program daerah. Akibatnya, aktivitas beberapa unit organisasi perangkat daerah juga terganggu. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, beberapa program dan kegiatan yang dijalankan terkadang menemui kendala hingga menghasilkan hasil yang kurang maksimal, namun inovasi terbaru masih terus dilakukan dalam menggali *best practice* dalam implementasi program dan kebijakan.

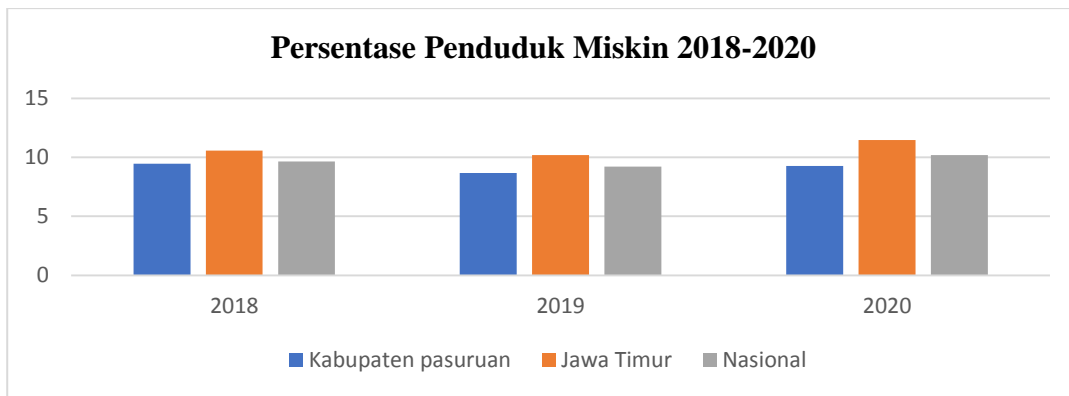
### **Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan**

Sejak awal adanya pandemi Covid-19, banyak penelitian yang sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam rangka menghadapi permasalahan sebagai dampak dari pandemi. (Setyadi & Indriyani, 2021) membuktikan bahwa upaya efektif

untuk menghindari kemiskinan akibat pandemi yaitu dengan mencegah pekerja dari pemutusan hubungan kerja dengan cara memberikan upah untuk membantu perusahaan membayar upah pekerja, walaupun sebagian. Hasil penelitian dari (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020), menyebutkan bahwa strategi untuk mengatasi kemiskinan membutuhkan kebijakan yang sesuai dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat agar hasil yang diinginkan tepat sasaran.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sangat diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, memenuhi hak dasar, dan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa program yang disiapkan pemerintah sudah tepat sasaran, namun beberapa lainnya masih membutuhkan evaluasi agar lebih efisien dan efektif. Sebab, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan efektif apabila mampu menurunkan angka kemiskinan, dan menambah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya program pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan keterlibatan pihak terkait untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan khususnya yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan program-program pengentasan kemiskinan pada 2019 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dibandingkan pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan justru kembali naik sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. **Gambar 2** menunjukkan persentase penduduk miskin kabupaten pasuruan, Jawa timur, dan Nasional dari tahun 2018 hingga 2020.



**Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan, 2020**

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2020

Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan baik di level Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan menyusut di angka 8,68 dan mengalami penurunan sebesar 0,77% daripada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin kembali naik di angka 9,26%, dan mengalami peningkatan sebesar 0,58% daripada tahun sebelumnya. Peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah mewabah sejak awal tahun 2020.

Tingginya angka kemiskinan selama masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh akses tempat umum yang ditutup, ratusan usaha terancam bangkrut, pegawai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lapangan kerja yang semakin sempit, sehingga menyebabkan masyarakat Kabupaten Pasuruan kehilangan pekerjaan dan cenderung menjadi pengangguran.

### **Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasuruan**

Strategi pengentasan kemiskinan perlu adanya pertimbangan yang cukup matang agar sesuai dan tertuju pada

sasaran yang tepat. Sebab, kegiatan yang disiapkan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, serta program lainnya. Adapun target untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) meliputi: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Kelompok program pengurangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

Program-program lainnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai upaya untuk menekan tingginya angka kemiskinan akibat pandemi, pemerintah Kabupaten Pasuruan dibantu Dinas Sosial serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

berusaha mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat miskin agar mereka dapat menjalani hidup yang lebih baik dan sejahtera dengan mengungkap beberapa program untuk pengentasan kemiskinan. Program tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban masyarakat, peningkatan kemampuan dan pendapatan yang sesuai serta pengembangan UMKM. Adapun program yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dinas Sosial telah menyiapkan program untuk menurunkan beban pengeluaran, khususnya saat pandemi. Dinas Sosial menjadi pelaksana program penanggulangan kemiskinan karena memiliki pengaruh yang kuat serta memiliki kepentingan terkait kesejahteraan masyarakat. Program yang diusung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial tersebut berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim. Program dan kebijakan tersebut antara lain, perlindungan dan jaminan sosial dengan

memberikan bantuan sosial dan subsidi serta jaring pengaman Covid-19.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sendiri telah melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jamkesmas-Jamkesda. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Pasuruan memiliki kegiatan unggulan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dan difasilitasi oleh pihak Kabupaten Pasuruan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan akibat pandemi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan turut terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan akibat pandemi. Program penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat.

**Tabel 3: Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, 2021**

No.	Instansi Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Dinas Sosial	Menurunkan Beban Pengeluaran	Perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 503.231.820
			Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 983.500.000
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 250.000.000
			Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 568.000.000
			Pengembangan UMKM	-
			Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp. 607.116.800

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan, 2021



Upaya penguatan UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berbasis pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kredit Usaha Bersama. Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga merancang kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang siap untuk mendukung setiap program. Meskipun demikian, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan cenderung kecil hingga penyelesaian masalah kemiskinan tidak terlalu signifikan. Mengutip dari artikel Warta Bromo.com, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2021 ditargetkan mencapai 3,26 Triliun, namun angka tersebut lebih kecil daripada tahun 2020 sehingga perlu adanya optimalisasi anggaran agar dapat memaksimalkan keberhasilan program yang telah direncanakan. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, Ia mengatakan bahwa penurunan anggaran tak lepas dari dampak Covid-19 sebab kondisi ekonomi secara nasional melemah, sehingga berdampak terhadap daerah.

### **Strategi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan**

Situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menghambat perkembangan perekonomian pada tingkat nasional hingga daerah. Berdasarkan 4 jenis kemiskinan yang dikemukakan oleh Mardimin (1996), Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan sebagai daerah dengan definisi kemiskinan situasional. Sebab, keadaan dan situasi pandemi yang tidak pasti saat ini membuat

masyarakat kehilangan pekerjaan, sulit memenuhi kebutuhan dasar, hingga menambah angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan.

Program penanggulangan kemiskinan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu adanya kolaborasi dengan pihak terkait agar dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif. Menurut Dunn (2000), kriteria efektivitas (*effectiveness*) yakni tepat sasaran dan program yang sesuai dengan kebutuhan. Program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan pada tahun sebelumnya cenderung sesuai, tepat sasaran dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan warga miskin. Namun, beberapa program masih dinilai belum efektif. Hal tersebut disebabkan kurang adanya dorongan dan campur tangan lebih dari pihak penting (*stakeholder*). Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan *stakeholder* agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal dan lebih efektif.

Adapun strategi untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan didapatkan dari dukungan dan keterlibatan aktif dari stakeholder (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat). Kerjasama aktor-aktor tersebut akan sangat solid ketika mereka berada dalam satu atap sebagai perumus, pelaksana dan pengawas. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Pasuruan berperan sebagai fasilitator, motivator, pengawas, dan evaluator terkait efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sektor swasta berperan sebagai penggerak serta pendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang berpihak pada kepentingan publik. Sedangkan masyarakat miskin merupakan energi dinamis sekaligus sebagai objek dalam

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin perlu terlibat dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan agar mereka mulai sadar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengedepankan kolaborasi antar pihak terkait, antara lain; program untuk menurunkan beban pengeluaran bergandengan dengan Dinas Sosial, serta penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif bergandengan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19. Program tersebut diberikan kepada penerima program berdasarkan pemetaan penerima program yang berlandaskan pada dokumen TNP2K. Dalam pelaksanaan program melibatkan masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang berwenang sehingga upaya tersebut sangat relevan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara optimal dan efektif.

## SARAN

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendataan masyarakat miskin secara berkala agar penerimaan program lebih merata, serta mampu membantu optimalisasi program pengentasan kemiskinan. Penulis juga menyadari keterbatasan penelitian ini sehingga studi selanjutnya diharapkan mampu mengeksplorasi strategi

pengentasan kemiskinan akibat pandemi lebih variatif dan lebih sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abizal Nova, dkk. 2022. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1, No 1. Hal 55-70.
- Badan Pusat Statistik. (2021, February). Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan.
- BPS. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.
- Badan Pusat Statistika. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Pasuruan: BPS.
- Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Hermawati, D. T. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan. *18*(1), 47–59.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115).
- Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. "Program Perlindungan Sosial dirancang Kurangi Angka Kemiskinan". Diakses melalui <https://www.kemendikopmk.go.id/program-perlindungan-sosial-dirancang-kurangi-angka-kemiskinan> [8-4-2022].
- Mantja, W. 2007. Etnografi Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Malang: Elang Mas.
- Mardimin, Yohannes, 1996, Kritis Proses Pembangunan di Indonesia, Penerbit Kanisius: Yogyakarta

- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.
- Pasuruan, P. K. (2020, May 20). Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Retrieved from Pasuruankab.go.id: <https://www.pasuruankab.go.id/page-s-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018.html>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, Desember. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i3.69>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan. 4.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Refika:Bandung
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D. Bandung : Alfabeta
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). SMERU Working Paper, April(April), 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. 3, 457–479.
- WartaBromo. (2020, December 1). *WartaBromo the fastest local online news*. Retrieved from WartaBromo.com: <https://www.wartabromo.com/2020/12/01/disahkan-apbd-2021-kabupaten-pasuruan-turun-rp-300-m-lebih/>
- WHO. (2021). COVID-19 Health System Response Monitor in Japan. *The Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies*, January.

[ Halaman Kosong ]